

PENDIDIKAN ISLAM DI PERSIMPANGAN JALAN

Oleh:
Ahmad Sugiri

Abstraks

Sejak masa-masa paling awal Islamisasi Nusantara, tradisi pendidikan dan pengajaran Islam telah muncul dan berperan penting dalam mentransmisikan ajaran Islam kepada masyarakat. Pada mulanya orientasinya hanya terbatas pada pengajaran membaca Al-Qur'an, pelajaran tatacara shalat dan kewajiban-kewajiban pokok agama. Dalam tradisi masyarakat Jawa, sistem pendidikan seperti ini dikenal dengan *Nggon Ngaji*. Setelah 'tamat' dari lembaga tersebut, sebagian anak-anak muslim kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu pesantren, suatu lembaga pendidikan tradisional Islam di Indonesia. Sampai saat ini para ahli masih memperdebatkan istilah dan asal-usul lembaga pendidikan tradisional Islam tersebut. Namun, terlepas dari semua itu, pesantren telah berperan penting dalam proses penyebaran dan pendalaman ilmu-ilmu keislaman kepada masyarakat. Sampai dengan awal abad ke-19 Indonesia memang belum mengenal sistem pendidikan modern atau pendidikan model Belanda. Indonesia hanya mengenal satu jenis pendidikan yang disebut dengan "Lembaga pengajaran asli," yaitu sekolah-sekolah agama dengan berbagai bentuknya (mesjid, Langgar, Surau, Pesantren).

Pendahuluan

Pada pertengahan abad ke 19, baru pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah modern yang diperuntukkan bagi penduduk pribumi secara terbatas, khususnya dari kalangan priyayi yang menjadi "sekutu" Pemerintah Hindia Belanda. Fenomena ini merupakan awal munculnya dualisme pendidikan di Indonesia. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda tersebut dalam perkembangannya ternyata berkonsekuensi terhadap eksistensi dan kualitas lulusan pesantren. Anak-anak Muslim, terutama yang

cerdas dan berbakat, tidak lagi menjadikan pesantren sebagai satu-satunya alternatif untuk belajar, tetapi ada alternatif lain yang dipandang lebih menarik, bukan saja karena sistem dan metode pembelajaran yang ditawarkan lebih ‘demokratis’, juga karena setelah mereka lulus dari sekolah-sekolah model Belanda tersebut menjanjikan pekerjaan dalam birokrasi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda. Dampak dari semua itu menyebabkan pesantren sebagai alternatif kedua, atau bahkan sekedar menjadi konpensasi, ketika mereka tidak diterima pada sekolah-sekolah Belanda. Di samping itu, kemunculan sistem Madrasah yang digagas dan didirikan oleh kelompok Islam reformis dengan memperkenalkan sistem modern, seperti yang dipraktekkan oleh sistem sekolah Belanda, juga turut memperlemah posisi pesantren, dan pada gilirannya menjadikannya sebagai salah satu motivasi bagi pesantren untuk melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian.

Ketika Indonesia merdeka, pesantren dan sekolah-sekolah agama (madrasah) berada di bawah naungan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), sementara sekolah-sekolah umum berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P & K). Fenomena ini semakin menegaskan atau melegitimasi dualisme pendidikan di Indonesia. Wacana untuk menyatukan dunia pendidikan ke dalam satu atap memang pernah muncul meskipun masih bersifat samar-samar, karena agaknya pembicaraan masalah tersebut secara politis sangatlah sensitif yaitu akan memancing munculnya reaksi dari umat Islam untuk kembali menggagas pembentukan negara Islam. Untuk mendekatkan ‘kesenjangan’ antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, maka pada tahun 1975 keluarlah SKB 3 Menteri. Akan tetapi kebijakan SKB 3 Menteri itu pun belum memecahkan berbagai persoalan yang melilit dunia pendidikan Islam, terbukti dengan munculnya kontroversi antara yang mendukung dan yang menolak. Tulisan ini mencoba menelusuri dan menelaah berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam di Indonesia dari dengan menggunakan pendekatan historis.

A. Lembaga Pengajaran Asli

Dari perspektif sejarah, islamisasi Nusantara berjalan melalui proses yang cukup lama dan menggunakan berbagai saluran atau cara, seperti perdagangan, perkawinan, politik, seni, mistik (tasawuf) dan pendidikan.¹ Masing-masing saluran tersebut memiliki karakteristik dan obyeknya tersendiri. Saluran perdagangan misalnya, ia lebih menekankan pada upaya pemberdayaan ekonomi umat dan sekaligus membangun jaringan sosial politik terutama di wilayah pesisir, dimana terdapat pelabuhan-pelabuhan sebagai tempat singgah para pedagang baik domestik maupun mancanegara. Para pedagang muslim kemudian membangun perkampungan-perkampungan kecil di sekitar pelabuhan, pada mulanya berfungsi sekedar untuk menunggu proses transaksi sampai barang-barang dagangan mereka habis terjual, atau melakukan barter namun kemudian fenomena tersebut secara bertahap berubah menjadi tempat tinggal permanen. Bahkan mereka juga melakukan perkawinan dengan wanita-wanita pribumi. Karena status sosial para pedagang tersebut dalam perspektif masyarakat pribumi dipandang cukup tinggi dan terhormat, maka banyak anak-anak gadis bangsawan dan elite politik yang menikah dengan para pedagang tersebut. Dalam ajaran Islam, seorang wanita yang akan dinikahi oleh seorang muslim haruslah terlebih dahulu memeluk Islam. Al-Qur'an secara tegas melarang menikahi perempuan-perempuan musyrik, sehingga ia terlebih dahulu masuk Islam. Dari proses perkawinan ini lambat laun maka terbentuklah keluarga-keluarga Muslim di wilayah pesisir yang pada gilirannya akan terbangun dengan sendirinya tata sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Kondisi sosial yang demikian, mendorong setiap orang tua muslim untuk mendidik anak-anak mereka tentang ajaran Islam sehingga bukan saja mereka

¹ Mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia banyak buku yang membahas masalah ini misalnya: A. Hasjmy (ed), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993; M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gajah Mada University Press);

kelak secara personal akan menjadi muslim yang taat menjalankan ajaran agama, di samping itu juga mereka akan dapat berinteraksi dalam kehidupan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai agama Islam.

Pada mulanya proses pendidikan di kalangan umat Islam dilakukan oleh para orang tua dan orang-orang yang dipandang mampu membaca Al-Qur'an dan menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang keislaman. Di antara mereka itu adalah para pedagang Muslim yang datang dari berbagai negara, Persia, India, Mesir dan Saudi Arabia. Mereka mengembara ke berbagai negara yang menjadi sentral perekonomian bukan sekedar untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi mereka juga merasa berkepentingan untuk menyebarkan Islam ke daerah-daerah yang dikunjunginya. Hal ini disebabkan tuntutan agama bagi setiap individu muslim untuk berperan mengemban misi tersebut. Agenda utama dalam pendidikan Islam awal adalah Membaca Al-Qur'an. Setiap orang tua muslim tentu mendambakan agar anak-anak mereka memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Untuk mencapai hal itu pertama-tama harus mampu membaca Al-Qur'an.

Sejalan dengan proses penyebaran Islam di Indonesia, pendidikan Islam mulai tumbuh, meskipun masih bersifat individual dan informal. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan memanfaatkan mesjid, surau, dan langgar, mulailah secara bertahap berlangsung pengajian umum mengenai tulis baca Al-Qur'an dan wawasan keagamaan. Bentuk paling mendasar dari pendidikan seperti ini umumnya disebut pengajian Al-Qur'an.² Pendidikan ini, selain disebutkan di atas, berlangsung di rumah imam masjid atau anggota masyarakat Islam yang soleh lainnya. Di tempat tersebut, anak-anak muslim diberi bekal pengetahuan agama, pengetahuan membaca Al-Qur'an, dan kecakapan lain yang diperlukan bagi kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim.

² Karel A. Steenbrink, *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, terj. A. Suryana A. Jamrah (Bandung: Mizan, 1995), hlm 117.

Di Jawa, secara tradisional, sekolah-sekolah Al-Qur'an atau pengajian Al-Qur'an tidak memiliki sebutan atau disebut secara jelas. Oleh orang Jawa, tempat pendidikan Al-Qur'an disebut *Nggon Ngaji*, yang berarti tempat murid-murid belajar membaca Al-Qur'an tahap permulaan. Sedangkan kegiatan murid-murid yang mengikuti pelajaran Al-Qur'an ini disebut dengan *ngaji Qur'an*.³ Pada masa kerajaan Islam Mataram (1575-1757) tampaknya lembaga *Nggon Ngaji* berkembang dengan subur.⁴ Pada tahun 1831, berdasarkan catatan pemerintah Hindia Belanda, dijumpai 1853 buah *Nggon Ngaji* dengan murid berjumlah 16.556 orang yang tersebar di beberapa kabupaten di Jawa yang didominasi penduduk Islam. Jumlah tersebut meningkat cukup tajam, ketika L.W.C. van den Berg menemukan 14.929 *Nggon Ngaji* dengan jumlah murid sekitar 222.663 orang pada tahun 1885.

Dilihat dari sistem pengelolaan, lembaga pendidikan *Nggon Ngaji* merupakan lembaga pendidikan milik masyarakat. Pada daerah-daerah yang Islamnya kuat, terutama di daerah-daerah Sunda dan Jawa, anak-anak, baik dari kalangan priyayi yang mampu maupun penduduk desa yang paling miskin sekalipun, harus belajar mengaji terlebih dahulu sebelum mempelajari pengetahuan lain. Oleh karena itu, masyarakatlah yang merasa perlu mendirikan, mengelola, dan bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup suatu lembaga pengajian Al-Qur'an. Pada umumnya lembaga ini tidak memperoleh subsidi dari penguasa. Pada masa kerajaan Islam, memang ada beberapa lembaga pendidikan Al-Qur'an yang mendapat bantuan dari kerajaan. Namun, sebagian besar dari lembaga ini tidak mendapat

³ Nor Huda, *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Arr Ruz Media, 2007, hlm. 370. Lihat Pula: Nor Huda, "Nggon Ngaji Bentuk Awal Lembaga Pendidikan Dasar Al-Qur'an di Jawa", dalam Toto Soeharto, Munir dan Nor Huda (ed), *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama dan Corpus, 2005), hlm. 47-70.

⁴ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1989), hlm. 223

bantuan apa-apa. Sedangkan pada masa kolonial Belanda, yang diskriminatif terhadap Islam, pada umumnya lembaga pendidikan tradisional Islam tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Pemberian subsidi terhadap pendidikan Islam dipandang hanya akan memajukan pendidikan Islam, yang hal itu justru akan merugikan kekuasaan dan pengaruh Belanda di Indonesia. Tanpa adanya subsidi dari pemerintah, pendidikan Islam terpaksa harus berjalan mandiri tanpa ada hubungan dengan pemerintah kolonial dan juga bertahan dalam tradisinya sendiri, tapi dalam waktu yang sama pendidikan Islam terbuka untuk perubahan.⁵

Setelah Indonesia merdeka, dan disusul dengan berdirinya Departemen Agama, lembaga-lembaga pendidikan dasar Al-Qur'an mengalami penyempurnaan-penyempurnaan kurikulum, sistem pendidikan, dan beberapa aspek kependidikan lainnya, sehingga memunculkan sebuah lembaga pendidikan baru yang disebut madrasah diniyah. Dengan demikian, lembaga pendidikan dasar Al-Qur'an merupakan cikal bakal lahirnya madrasah diniyah, yang mendapat subsidi dan bimbingan dari pemerintah. Pada kenyataannya, berdirinya madrasah-madrasah diniyah tidak menghapus eksistensi lembaga pendidikan *Nggon Ngaji*. Walaupun demikian keberadaan madrasah diniyah menjadikan kurikulum lembaga *Nggon Ngaji* lebih banyak berkurang. Sekarang lembaga *Nggon Ngaji* "hanya" sebagai tempat belajar membaca Al-Qur'an, sedangkan pendidikan lain sudah diambil alih Madrasah Diniyah. Selain itu, lembaga *Nggon Ngaji*, kadang-kadang masih mempunyai fungsi yang tetap, dan menjadi tempat untuk mendapatkan pelajaran agama bagi murid-murid yang telah mengikuti pelajaran di Madrasah, atau sekolah-sekolah umum.⁶

Di samping lembaga *Nggon Ngaji*, masyarakat Islam Indonesia juga menyelenggarakan tradisi pendidikan di pesantren. Mengenai asal-usul lembaga ini para ahli masih memperdebatkannya. Dari perspektif sejarah, eksistensi pesantren diduga terkait dengan

⁵ Nor Huda, *Sejarah Intelektual Islam di Indonesia*, hlm. 375

⁶ Nor Huda, *Sejarah Intelektual Islam di Indonesia*, hlm.376

hak-hak istimewa yang dimiliki ulama pada masa kerajaan Islam. Hak-hak khusus kepada ulama merupakan wujud perlindungan dan dorongan kerajaan terhadap kehidupan beragama. Untuk itu, kerajaan memberikan sebuah wilayah bebas (desa perdikan) kepada ulama untuk dikelola. Desa perdikan ini tidak saja sebagai mata pencaharian ulama, tetapi yang terutama agar ulama yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis sehingga dapat memberi pelayanan kepada masyarakat secara baik dan memuaskan.

Sementara itu, H.J.de Graff dan Pigeaud, berpendapat bahwa pesantren merupakan kelanjutan dari lembaga sejenis zaman pra Islam di Indonesia yang disebut dengan *Mandala* dan *abrama*. Mereka mengindikasikan bahwa pertapaan-pertapaan jenis pra Islam bertahan beberapa waktu setelah Jawa diislamkan, bahkan pertapaan-pertapaan baru terus didirikan. Dalam beberapa periode, sejumlah *mandala* secara bertahap ditransformasikan ke dalam pesantren, di mana para guru (kyai) melanjutkan ajarannya tentang pengetahuan mistik, di samping tentang doktrin-doktrin Islam. Dengan demikian, secara historis, pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga keaslian (*indigenous*) Indonesia, karena lembaga serupa sudah ada pada masa Hindu Budha berkuasa di Indonesia, sedangkan Islam tinggal meneruskan dan mengislamkannya.⁷

Terlepas adanya perdebatan di sekitar asal-usul pesantren, dan metode pembelajaran yang dijalankan di lembaga pendidikan tradisional Islam tersebut, pesantren telah berperan penting dalam mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu. Pesantren juga telah berhasil membangun suatu kultur yang unik. Bahkan dalam batas-batas tertentu, pesantren merupakan sub kultur tersendiri. Tiga unsur pokok yang membangun sub kultur pesantren: pertama, pola kepemimpinannya yang berdiri sendiri yang berada di luar kepemimpinan pemerintahan desa, kedua, literatur universal yang telah dipelihara selama beberapa abad, dan ketiga, sistem nilainya

⁷ Noe Huda, *Sejarah Intelektual Islam di Indonesia*, hlm.377

sendiri yang terpisah dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat di luar pesantren.

B. Lembaga Pendidikan Model Belanda

Abad kesembilanbelas terjadi perubahan-perubahan yang bisa dikatakan cukup fundamental dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Perubahan-perubahan ini bukan saja berkaitan dengan persoalan hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan penduduk pribumi secara umum, tetapi juga terkait hubungan dengan umat Islam selaku penduduk mayoritas di Indonesia. Sementara itu, di kalangan internal umat Islam itu sendiri, juga terjadi perubahan, terutama dalam masalah keagamaan dan pendidikan. Munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam atau reformisme merupakan fenomena pada akhir abad kesembilanbelas.⁸ Reformisme telah membawakan persoalan yang cukup kompleks dalam kehidupan sosial keagamaan. Misalnya, munculnya polarisasi pemahaman dan pengamalan di sekitar ajaran agama yang bersifat *furū* atau cabang, adanya dikotomi modernis tradisional, dan bahkan di kalangan masyarakat tertentu terjadi konflik-konflik sosial.

Pertengahan abad kesembilanbelas, pemerintah Hindia Belanda berupaya menampilkan orientasi baru terkait hubungan antara pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah dengan penduduk pribumi sebagai rakyat jajahan. Perubahan itu terkristalisasi dalam bentuk kebijakan secara umum yang kemudian dikenal dengan politik etis. Dilihat dari istilahnya dapat dipahami bahwa perubahan politik itu mengarah kepada prilaku yang lunak dan persuasif. Meski kata 'lunak' sendiri dalam perspektif politik tidak mesti dipahami sebagai suatu hal positif. Kata lunak dapat diartikan positif manakala dibandingkan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda sebelumnya, yaitu tanam paksa yang dalam implementasinya terjadi eksploitasi yang luar biasa terhadap sumber-sumber kekayaan

⁸ Salah satu buku yang cukup luas membahas masalah pembaharuan Islam di Indonesia yaitu, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982)..

bumi Nusantara, sehingga memunculkan gejolak sosial dan reaksi-reaksi yang keras dari penduduk pribumi, seperti munculnya pemberontakan-pemberontakan di hampir seluruh daerah-daerah di Indonesia.

Dari segi ekonomi, selama diberlakukannya kebijakan tanam paksa menyebabkan pemerintah Hindia Belanda memperoleh keuntungan yang luar biasa besarnya. Akan tetapi, pemerintah Hindia Belanda juga harus mengeluarkan kos atau biaya yang cukup besar untuk menumpas berbagai perlawanan dari rakyat jajahan. Bagi umat Islam sendiri, perlawanan itu bukan saja disebabkan telah terjadinya eksploitasi ekonomi dengan cara-cara yang tidak dapat diterima oleh mereka, tetapi ada faktor lain yang mengobarkan perlawanan itu, yaitu sikap pemerintah Hindia Belanda yang mendukung misionaris atau kristenisasi, meskipun upaya tersebut tidak segencar seperti yang dilakukan oleh Portugis⁹

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, di negeri Belanda sendiri telah terjadi perubahan politik, dimana komposisi kekuatan di parlemen Belanda telah mengalami perubahan, apabila sebelumnya partai-partai agama mendominasi kursi di Parlemen, kini dengan kemenangan partai-partai liberal, maka komposisinya menjadi terbalik, Parlemen Belanda didominasi oleh orang-orang dari partai liberal yang cenderung mengabaikan agama dalam persoalan politik. Sebagai konsekuensinya, pengiriman para zending ke Hindia Belanda (Nusantara) tidak segencar sebelumnya.

Dengan kebijakan politik etis, pemerintah Hindia Belanda berupaya menjalin hubungan dengan penduduk pribumi melalui pendekatan budaya, dalam hal ini adalah budaya Barat (Belanda). Dasar pemikirannya adalah, apabila budaya Belanda dapat diterima oleh penduduk pribumi maka diharapkan mereka akan menampilkan sikap akomodatif terhadap pemerintah Hindia Belanda, dan sekaligus

⁹ Negara-negara Eropa nampaknya belum dapat melupakan konflik-konflik antara umat Islam dengan mereka, misalnya peristiwa Perang Salib, pendudukan Spanyol (Andalusia), dan ekspansi Turki Utsmani ke beberapa negara Eropa Timur.

juga diharapkan akan meredakan pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tujuan akhirnya adalah dalam rangka melanggengkan kekuasaan mereka di Nusantara. Karenanya, pemerintah Hindia Belanda dengan berbagai cara unsur-unsur budaya Barat yang skuler dengan gencar diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda nampaknya lebih memilih priyayi sebagai sasaran westernisasi. Sementara elemen santri yang menurut analisa Geertz diasumsikan lebih taat dalam menjalankan ajaran agama (Islam) “diasingkan” karena kelompok ini lebih banyak melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Salah satu saluran yang paling efektif untuk mensosialisasikan budaya barat yaitu melalui jalur pendidikan. Karenanya pemerintah Hindia Belanda pada pertengahan abad ke XIX memperkenalkan sistem pendidikan modern. Sejak dasawarsa 1870-an pemerintah Hindia Belanda mendirikan *volkschoolen*, sekolah rakyat, atau sekolah desa. Pada 1871, terdapat 263 sekolah dasar semacam itu dengan jumlah siswa 16.606 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 515 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 52.685 orang menjelang 1892. Kehadiran sekolah-sekolah model Belanda dan keengganan pemerintah Hindia Belanda mengadopsi model pendidikan tradisional pribumi (Islam) merupakan awal dari dualisme sistem pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

Pada mulanya, kehadiran sekolah-sekolah modern model Belanda tersebut mengalami kesulitan besar karena sekolah-sekolah tersebut ternyata hanya dinikmati oleh lapisan tipis kalangan atas. Di samping itu ada beberapa keberatan di lingkungan beberapa pemimpin Islam yang tidak setuju diadakannya sekolah bagi wanita. Begitu Keempat, tujuan pendidikan sekolah milik pemerintah Hindia Belanda adalah haram atau sekurang-kurangnya menyalahi ajaran Islam, sehingga sangat berpengaruh terhadap cara pandang umat Islam di Indonesia. Dalam analisa Nor Huda, adanya beberapa keberatan dari sebagian besar pemimpin Islam itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya stigma yang memandang bahwa pemerintah Hindia Belanda identik dengan kekeristenan. Kedua,

didasarkan pada fenomena yang ditimbulkan oleh usaha pemerintah Hindia Belanda untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Islam melalui pendidikan yang bersifat skuler karena pendidikan agama tidak termasuk bagian dari pendidikan yang didirikan oleh pemerintah tersebut. Ketiga, adanya diskriminasi dalam memperoleh pendidikan dimana pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut hanya bertujuan mendidik anak-anak priyayi.

C. Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam

Terlepas dari peran pendidikan pesantren dalam konteks pendidikan nasional sebagaimana digambarkan di atas, pada abad kesembilanbelas lembaga ini mulai mendapat kritikan, baik dari kurikulum yang diajarkan yang hanya terfokus pada pembelajaran ilmu-ilmu agama karya para ulama klasik yang ada dalam kitab-kitab kuning, maupun dari segi metode pembelajaran yang diterapkan dipandang oleh kaum reformis kurang mengakomodir kreatifitas dan kebebasan nalar para santri. Kritikan tersebut dari dua arah, pertama datang dari kolonialisme Belanda, sebagaimana diulas di atas, pemerintah Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19 telah mengembangkan sistem pendidikan modern, dengan membuka sekolah-sekolah dengan metode dan kurikulum yang modern, kedua dari para muslim reformis yang juga mengembangkan sistem pendidikan yang bernama madrasah. Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan Barat dalam bentuk skuler yang dikembangkan penjajah merupakan tantangan tersendiri akan eksistensi pendidikan Islam klasik di negara-negara Islam. Problem yang sama, sebagaimana di Mesir pada abad ke-19, juga dirasakan di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Sampai munculnya gerakan pembaharuan pada akhir abad ke-19, respons atas tantangan itu lebih bersifat isolatif, bahkan cenderung defensif. Pendidikan Islam mengasingkan diri dari pengaruh pendidikan modern. Pendidikan Islam hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan menolak mengajarkan ilmu-ilmu umum.

Lahirnya madrasah pada awal abad ke-20 dapat dikatakan sebagai perkembangan baru di mana pendidikan Islam mulai

mengadopsi matapelajaran-matapelajaran non-keagamaan. Hal ini dimungkinkan karena gerakan pembaharuan muncul dengan semangat yang sangat progresif seperti halnya di Timur Tengah di bawah pengaruh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ini merupakan salah satu alasan bahwa madrasah di Indonesia tidak mencontoh sepenuhnya sekolah-sekolah Belanda. Lembaga madrasah juga dimungkinkan merupakan proses logis dari gerakan pembaharuan yang dilancarkan umat Islam sendiri.¹⁰ Pengaruh tokoh-tokoh Timur Tengah ini terhadap pendidikan di Indonesia sangat dimungkinkan mengingat jaringan intelektual Islam yang sudah beberapa abad terbentuk di kedua wilayah ini.

Latar belakang kelahiran madrasah sendiri bertumpu pada dua faktor penting, pertama, pendidikan Islam tradisional kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai, kedua, laju perkembangan sekolah-sekolah model Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawa watak skulerisme sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana. Sementara menurut Muhaimin dan Abdul sebagaimana dikutip oleh Nor Huda, kehadiran madrasah paling tidak karena alasan (1) sebagai manifestasi pembaharuan sistem pendidikan Islam, (2) penyempurnaan sistem pesantren, (3) keinginan sebagian kalangan santri terhadap model pendidikan Barat, dan (4) sebagai sintesis sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan Barat.¹¹

Garis kebijakan pendidikan agama yang positif telah dimulai dengan adanya kantor agama pada zaman Jepang, *Shumubu*. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Departemen Agama sesudah 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum, di

¹⁰ Maksum, Madrasah, *Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 88

¹¹ Nor Huda, *Islam Nusantara...*, hlm. 393

samping mengembangkan madrasah itu sendiri. Secara khusus, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama.

Upaya membenahi madrasah, paling tidak sejajar dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional, terus digulirkan oleh Departemen Agama. Pada 1975 telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri – No. 6 Tahun 1975. Dalam bab II pasal 2 disebutkan bahwa : a) Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, b) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas. Namun, konsekuensinya madrasah harus mengubah kurikulumnya dengan 70 % pelajaran umum dan hanya 30 % pendidikan agama.

Meskipun dari sisi eksistensi dan pengakuan terhadap madrasah merupakan keberhasilan yang strategis, seperti diakuinya ijazah madrasah bukan saja oleh Departemen Agama, tetapi juga oleh departemen Pendidikan dan kebudayaan, namun dengan komposisi kurikulum seperti yang ditetapkan dalam SKB itu, penguasaan terhadap ilmu agama bagi lulusan madrasah menjadi berkurang, yang pada gilirannya akan mendangkalkan penguasaan pengetahuan agama di masyarakat. Karena itu, banyak tokoh masyarakat – ulama dan ustadz – dan pengelola pendidikan Islam, yang memang merupakan orang yang terlibat langsung dengan nasib madrasah, bereaksi sangat keras dan menyatakan menolak SKB Tiga Menteri. Tuduhan dialamatkan kepada A.Mukti Ali, sebagai pejabat Menteri Agama (1972-1977) waktu itu, sebagai orang yang ingin menghancurkan lembaga pendidikan Islam. Kelemahan tersebut pada dasarnya sudah disadari oleh Mukti Ali sejak awal. Namun, target yang sebenarnya adalah bagaimana umat Islam mengakhiri dikotomi keilmuan, ilmu keagamaan dan ilmu umum. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan, harus berperan untuk tujuan itu, yakni menghapus dikotomi ilmu. Akan tetapi upaya Mukti Ali itu tidak diimbangi dengan perangkat pendukung di tingkat bawah, akibatnya kebijakan itu justru akan melemahkan keilmuan lulusan madrasah.

Kualitas lulusan madrasah tanggung dalam penguasaan pengetahuan umum, dan juga dangkal dalam penguasaan ilmu agama.

Menyadari semakin surutnya pengetahuan agama lulusan madrasah sebagai dampak dari SKB tersebut, maka bermunculan berbagai jenis madrasah. Dalam rangka memudahkan pembinaan dan bimbingan, Departemen Agama menetapkan dua jenis madrasah. Pertama, madrasah yang selain menetapkan pelajaran agama sebagai matapelajaran pokok, juga memasukkan matapelajaran umum dalam kurikulumnya. Jenis kedua adalah madrasah yang semata-mata mempelajari agama dan isi kurikulumnya semua pelajaran agama. Jenis madrasah kedua ini selanjutnya disebut *Madrasah Diniyah*.

Di era Munawir Sjadzali, sebagai Menteri Agama (1983-1988 dan 1988-1993) dilakukan “penyempurnaan” dengan mengadakan pilot project Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan muatan kurikulum 70 % pengetahuan agama dan 30% pengetahuan umum. Salah satu yang menjadi landasan filosofinya disebabkan lulusan madrasah dengan pola SKB kurang siap untuk meneruskan ke perguruan tinggi agama, di samping lemahnya penguasaan bahasa Arab, meskipun dalam prakteknya Perguruan Tinggi Agama Islam sendiri dalam merekrut mahasiswanya kurang memperhatikan persoalan asal sekolah dari calon mahasiswanya. Tidak sedikit Perguruan Tinggi Islam (PTI) yang kemudian menerima mahasiswa dari sekolah-sekolah umum. Salah satu penyebabnya adalah tidak semua lulusan Madrasah Aliyah yang melanjutkan ke PTI.

DAFTAR PUSTAKA

- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*, terj. Safroedin Bahar, Jakarta: Grafiti Press, 1985
- Departemen Agama, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi atas Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1990
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi*, terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983
- Hasjmy, A. (ed), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993
- Huda, Nor, *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007
- Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000